





## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : UUD HASAN MUHTAR

NIM : DO3303052

Judul : UPAYA KEPALA MADRASAH DALAM  
MENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) UNTUK PENGEMBANGAN  
MADRASAH DI MI AL-KARIM BENDUL MERISI  
WONOCOLO SURABAYA

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 21 Desember 2010

Pembimbing,



**Drs. H. Masyihudi Ahmad, M. Pd.I**  
NIP.195606221986031002

















Berdasarkan pernyataan diatas, penulis memandang bahwa adanya dana BOS merupakan hal yang penting bagi peserta didik dan lembaga pendidikan yang kurang mampu dalam hal terbatasnya fasilitas sekolah. Dengan demikian, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang “ *Pengelolaan Dana BOS untuk pengembangan madrasah Di madrasah ibtidaaiyah (MI) Al-Karim – Bendul Merisi – Surabaya*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana BOS di MI Al-Karim Bendul Merisi Surabaya
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan BOS di MI Al-Karim Bendul Merisi Surabaya

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian dan pengelolaan dana BOS.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan BOS di MI Al-Karim Bendul Merisi Surabaya

















**Bab III** Merupakan paparan hasil penelitian yang berisi tentang penyajian data dari hasil penelitian yaitu strategi pengembangan lembaga melalui pengelolaan dana BOS dan analisis data dari hasil penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian

**BAB IV** Adalah penutup yang berisi saran dan kesimpulan dari isi pembahasan tentang “ Pengelolaan dana BOS Untuk Pengembang madrasah di MI Al-Karim –Bendul merisi–Surabaya”







⇒ Macam–Macam Lembaga Formal

a. Di Tinjau Dari Segi Yang Mengusahakan

- Sekolah Negeri, yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik dari segi pengadaan fasilitas, keuangan maupun pengadaan tenaga pengajar.
- Sekolah Swasta, yaitu sekolah yang diusahakan oleh selain pemerintah, yaitu badan–badan swasta, dilihat dari statusnya, sekolah swasta ini terdiri dari: Disamakan, Diakui, Terdaftar, Tercatat.

b. Ditinjau dari Sudut Tingkatan

Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari:

1. Pendidikan Dasar

- a. Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah
- b. SMP / MTs

2. Pendidikan Menengah

- a. SMU dan Kejuruan
- b. Madrasah Aliyah

3. Pendidikan Tinggi

- a. Akademi
- b. Institut





- 2) Mereka yang drop out dari sekolah/pendidikan formal baik dari segala jenjang pendidikan
  - 3) Mereka yang telah lulus satu tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tetapi tidak dapat meneruskan lagi
  - 4) Mereka yang telah bekerja tetapi masih ingin mempunyai keterampilan tertentu.
2. Menurut surat keputusan Menteri Dep.Dik.Bud.nomor: 079/0/1975 tanggal 17 April 1975, Bidang Pendidikan Non Formal meliputi:
- 1) Pendidikan Masyarakat
    - a. Fungsi
      - Membina program kegiatan dan kurikulum latihan masyarakat
      - Mengurus dan membina tenaga teknis pendidikan masyarakat
      - Mengurus dan membina sarana pendidikan masyarakat
    - b. Tugas
      - Menyusun program kegiatan dan memberi petunjuk serta pengarahan kepada orang yang bergerak di bidang masyarakat

- Mengendalikan dan menilai tenaga teknis serta menggunakan sarana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Membimbing dan mengendalikan kegiatan usaha di bidang pendidikan masyarakat
- Menyelenggarakan supervise, membuat laporan dan mengajukan usul kepada Ka Kanwil setempat.

## 2) Keolahragaan

### a. Fungsi

- Membina program olah raga dengan kurikulum pendidikan luar sekolah
- Mengurus tenaga teknisnya dan sarana prasarannya.

### b. Tugas

- Menyusun program keolahragaan
- Menilai tugas teknisnya
- Membimbing dan mengendalikan penyelenggaraannya.
- Membuat laporan berkala
- Mengajukan usul/saran/pertimbangan kepada atasannya

## 3) Pembinaan Generasi Muda

### a. Fungsi

- Membina program kegiatan dan kurikulum latihan kepemudaan.
- Mengurus dan membina tenaga tehnis kegiatan pembinaan generasi muda termasuk sarananya.

b. Tugas

- Menyusun program kegiatan pembinaan generasi muda dan membina generasi muda
- Mengendalikan dan menilai tenaga tehnis beserta sarana dan prasarananya
- Membina kerja sama dengan badan lain yang terkait
- Menyelenggarakan supervisi
- Membuat laporan/usul/saran/pertimbangan kepada Ka Kanwil.<sup>9</sup>

3. Pendidikan ini mempunyai ciri–ciri sebagai berikut:

- 1) Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah
- 2) Peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah atau *drop out*.
- 3) Tidak mengenal jenjang, dan program pendidikan untuk jangka waktu pendidikan
- 4) Peserta tidak perlu homogen

---

<sup>9</sup> Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, 164-166



















- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 331/M/V/9/1968 tentang Pedoman bagi Pegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas pada bendahara/pemegang Kas.
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 323/M/V/9/1968 tentang buku kas umum dan cara mengerjakannya.
- g. Undang-Undang No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan badan pemriksaan keuangan (BPK).
- h. Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.04/2000 pasal 4 (1a) tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah oleh bendahara dan pemerintah sebagai pemungut pajak PPN.
- i. Keputusan Menteri Keuangan No. 547/KMK.04/2000, tentang Penunjukan Pendararawan Pemerintah sebagai Pemungut.
- j. Undang-undang No. 17 tahun 2000, pasal 21 tentang Bendaharawan wajib memungut PPh.
- k. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-545/PJ/2000, BAB III pasal 5, tentang petunjuk pelaksanaan pomohonan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan orang pribadi.
- l. Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.





- Digunakan untuk membeli ATK/Bahan/Pengadaan/lain-lain.
- Untuk pengadaan ATK/bahan/pengadaan Formulir/lain-lain dengan nilai, sebelum ditambahkan pajak pertambahan nilai (PPN), diatas Rp 1 Juta akan dikenai pajak pertambahan Nilai sebesar 10 % dan pajak penghasilan pasal 22 (pph 22) sebesar 1,5 % yang harus disetorkan ke Kas Negara melalui kantor pos/Bank pemerintah setempat.
- Untuk keabsahan bukti pengeluaran yang memuat sejumlah uang agar diperhatikan ketentuan mengenai bea materai yang besarnya berkaitan dengan nilai pembelian yang tercantum pada bukti tersebut.

## 2) Buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan

- Pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan dilakukan oleh sekolah dengan melakukan perbandingan harga dan harus diperiksa kualitasnya, bahan yang tidak memenuhi standart harus ditolak.
- Untuk pengadaan dengan nilai, sebelum ditambahkan pajak pertambahan nilai (PPN), diatas Rp 1 Juta akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % dan pajak penghasilan pasal 22 (PPh 22) sebesar 1,5 % yang harus disetorkan ke Kas Negara melalui kantor Pos/Bank pemerintah setempat.









- 4) Membangun gedung/ruangan guru
  - 5) Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
  - 6) Menanamkan saham
  - 7) Membiayai segala jenis yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru Bantu dan kelebihan jasa mengajar.
- e) Pembatalan Dana BOS

Dalam hal sekolah penerima dana BOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerimaan BOS atau tutup/Bubar maka bantuan dibatalkan dan dana BOS harus disetorkan kembali ke Kas Negara.

f) Pertanggung Jawaban Keuangan

a) Tingkat Propinsi

Pengelolaan dan BOS propinsi berpedoman pada:

- Ketentuan pembayaran atas dana APBN
- Ketentuan Pengadaan barang/jasa instansi pemerintah
- Ketentuan perpajakan
- Ketentuan pembukuan keuangan negara

b) Tingkat Kabupaten/Kota

Pengelolaan dana BOS kabupaten/kota berpedoman pada:

- Ketentuan pembayaran atas dana APBN
- Ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah



- Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
  - Setiap akhir bulan buku kas umum dan buku pembantu ditutup oleh bendahara dan diketahui kepala sekolah.
  - Uang tunai yang ada di kas tunai tidak lebih dari Rp 5 Juta.
- d. Bukti Pengeluaran
- Setiap transaksi pengeluaran, harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah.
  - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000, tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000, dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000, dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000, dikenai materai dengan tarif sebesar Rp 6000.
  - Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
  - Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi.





















merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana yang meliputi suatu system total sepanjang periode tertentu, dan usaha mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi organisasi.<sup>35</sup>

- Menurut Miles and Schmuch

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk menerapkan ilmu perilaku guna pengembangan system dengan menggunakan metode – metode refleksi dan analisis diri.<sup>36</sup>

Sedangkan pengertian lembaga pendidikan menurut Hasbullah adalah wadah/tempat suatu proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan.<sup>37</sup> Menurut Muhaimin lembaga pendidikan adalah organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga – lembaga baik yang permanent maupun yang berubah – ubah dan mempunyai pola – pola tertentu dalam memerankan fungsinya,serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam

---

<sup>35</sup> James L Gibson, Ter Djoerban Wahid, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur dan Proses* (Jakarta: Erlangga, 1990), 658

<sup>36</sup> Umar Nimran, *Perilaku Organisasi* (Surabaya: Citra Media, 1997), 109

<sup>37</sup> Hasbullah, 127











Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah.

Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Berkenaan dengan dana keuangan yang diterima oleh sekolah, pada praktiknya sekolah perlu melakukan pengawasan tingkat sekolah, yaitu untuk mengetahui (1) tentang kesesuaian antara alokasi dana dan penggunaannya pada setiap kegiatan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta (2) kecocokan antara administrasi keuangan dan pelaporan.

Salah satu sumber keuangan sekolah yang saat ini digulirkan oleh pemerintah khususnya untuk Lembaga Pendidikan Dasar (SD/SDLB) dan Menengah (SMP/SMPLB) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tentu saja bagi sekolah-sekolah tertentu selain dana BOS ada sumber keuangan lain selain dari pemerintah diantaranya dana dari orang tua siswa, dana dari masyarakat, dana dari sumbangan alumni, dana dari peserta sebuah kegiatan yang diadakan sekolah, dana dari kegiatan wirausaha sekolah dan lain-lain.

Sebagai institusi pengguna langsung dana BOS, Lembaga Pendidikan Dasar (SD/SDLB) dan Menengah (SMP/SMPLB), khususnya sekolah-sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS, wajib mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan di sekolahnya sesuai Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Seluruh kegiatan belanja/pengadaan barang dan jasa harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu semua transaksi pembelanjaan dan atau pengadaan mesti dilampirkan sebagai bukti pelaporan/pertanggungjawaban.

Factor pendukung dan penghambat program BOS menurut kepala sekolah, guru dan komite sekolah.

Efektifitas program banyak dipengaruhi berbagai hal, demikian halnya dengan program BOS. Pengaruh itu dapat dating dari factor internal yakni program maupun orang yang menjadi sasaran program, factor sarana dan prasarana, dan mekanisme kerja program itu sendiri meliputi banyak hal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang menjadi factor pendukung program dari sisi internalnya adalah pengetahuan staf bos tentang prosedur /tata cara penggunaan dana BOS cukup baik

Hal-hal pendukung yang berasal dari faktor luar program adalah terjalinnya kerja sama, komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) dengan komites sekolah. Hal ini dibuktikan dengan intensitas kehadiran komite sekolah di sekolah yang cukup tinggi sebagaimana pengamatan peneliti. Hasil pengamatan ini juga diukung oleh penuturan salah seorang informan, yaitu kerja sama selama ini dinilai cukup baik, kita setiap akhir minggu ada pertemuan. Disamping itu, pelaksanaan program BOS juga memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam tata carapenggunaan dana BOS sebagai mana tertuang dalam petunjuk pelaksana (JUKLAK) dan petunjuk teknis (Juknis) BOS dengan baik.

Menurut hasil penelitian sebagaimana disampaikan oleh informan , factor penghambat dari sisi internal program adalah minimnya pengetahuan orang tua siswa tentang program BOS.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor eksternal yang dinilai menghambat jalanya program adalah alokasi dana yang sangat minim, penyaluran dana yang sering mengalami keterlambatan, dan kurangnya keterlibatan tim PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS disekolah, dan pengetahuan masyarakat sangat minim tentang program BOS. Pernyataan seorang \informan berikut ini dapat menggambarkan pernyataan diatas.



Factor factor yang dinilai menghambat jalanya program adalah alokasi dana BOS yang sangat minim, keterlambatan penyaluran dana BOS, pengetahuan masyarakat minim tentang BOS, dan kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua dalam rapat untuk memberikan masukan dan saran untuk program disekolah.

Mengenai dana BOS yang jumlahnya sangat terbatas, akan banyak berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan kesiswaan, ditambah lagi keterlambatan penyaluranya sehingga kadang kadang pihak sekolah mengalami kesulitan, dan untuk menutupi kesulitan itu terpaksa meminta orang tua murid membayar kegiatan opsional disekolah, dan uang orang tua akan dikembalikan setelah dana BOS turun,





perubahan zaman yang menuntut madrasah pendidikan di atas berubah dimulai dengan perubahan struktur yang menjabat diorganisasi sebagai Contoh bapak H. Abu Naim sebagai ketua, dibantu oleh bapak Jumari dan bapak H. Muasim, yang kemudian meneruskan Visi organisasi terinspirasi untuk mendirikan Madrasah formal untuk menjawab tuntutan zaman, perkembangan masyarakat dan tetap mempertahankan Madrasah diniyah.

Dari Madrasah yang masih semi formal yang belum didaftar ke pemerintah, maka pada tahun 1978 mulai terwujud mengembangkan Madrasah formal dan mempertahankan diniyah. Akhirnya melalui proses yang panjang dan kerjasama yang baik pengurus lama dibantu pengurus baru mendapat pengakuan Departemen Agama Surabaya. Di sisi lain reorganisasi tersebut membawa berkah masyarakat ikut berpartisipasi dalam mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Awal mula berdiri mempunyai luas tanah 500 m<sup>2</sup> kemudian bertambah wakaf seluas 500 m<sup>2</sup> dengan perincian di depan Madrasah 250 m<sup>2</sup> dan di belakang Madrasah dengan luas yang sama juga. Sejarah kepemilikan tanah seluas 500 m<sup>2</sup> tersebut adalah milik bapak Jumari, kemudian tanah yang berada di depan yang seluas 250 m<sup>2</sup> telah dibangun sebuah Mushola, di sampingnya terdapat Madrasah RA (Raudhatul Athfal/TK).

Madrasah yang berada di belakang adalah peralihan kepemilikan yang berawal dari pemilik bapak Jumari, karena suatu hal beralih kepada bapak H. Abu Naim. Pada tahun 2004 bapak H. Abu Naim meninggal dunia. Kemudian





- k. Kepemilikan Tanah : Milik Sendiri
- l. Status Tanah : Milik sendiri
- m. Luas tanah : 1200 m<sup>2</sup>
- n. Status bangunan : Milik sendiri
- o. Luas seluruh bangunan : 1800 m<sup>2</sup>
- p. Kepala Madrasah : Hj. Luluk Chumaidah, SH
- q. Waktu KBM : Pagi
- r. Jumlah guru : 17 Guru
- s. Jumlah Tenaga Kepend. : 3
- t. Jumlah siswa : 97
4. Motto, Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah
- a. Motto
- Tumbuhkan budaya malu
  - Malu karena datang terlambat
  - Malu karena melihat rekan sibuk melakukan aktifitas
  - Malu karena melanggar peraturan
  - Malu karena berbuat salah
  - Malu karena bekerja tidak berprestasi
  - Malu kerena tugas tidak terlaksana atau tidak tepat waktu
  - Malu tidak berperan aktif dalam memewujudkan kebersihan lingkungan kantor
- b. Visi MI Al-Karim





















Jadi pada dasarnya dana BOS yang dikelola oleh MI Al-Karim Bendul Merisi Surabaya semuanya untuk kebutuhan siswa, antara lain : untuk belanja barang ATK, bahan habis pakai , langganan daya dan jasa, kegiatan belajar mengajar , kegiatan kesiswaan, penyelenggaraan perpustakaan..

## 2. Pengembangan Madrasah Pendidikan di MI AL-Karim bendul merisi surabaya.

Setiap madrasah pendidikan pasti menginginkan madrasah nya berkembang dan menjadi lebih baik, untuk itu dalam mewujudkan nya MI Al-Karim Bendul Merisi Surabaya melakukan pengembangan dengan cara peningkatan SDM, misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki untuk dijadikan bekal dalam mengembangkan dirinya. dan meningkatkan kualitas atau mutu siswa baik di bidang akademik maupun non akademik agar dapat dijadikan bekal setelah keluar dari MI Al-Karim Bendul Merisi Surabaya misalnya dengan mengikuti lomba-lomba baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Dalam mengembangkan madrasah MI Al-Karim Bendul Merisi Surabaya selain meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas guru juga memelihara dan menambah sarana prasarana misalnya penambahan computer agar semua siswa dapat menggunakannya secara efektif dan efisien.



















misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan pembuatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan peningkatan siswa penambahan jam pelajaran serta perbaikan atau pemeliharaan sarana-prasarana misalnya, computer.

Di dalam melakukan strategi tersebut, seorang Kepala Madrasah melakukan perencanaan agar semua strategi tersebut dapat berjalan dengan baik, kemudian melakukan koordinasi agar semua guru dan staf dapat membantu terwujudnya strategi yang diinginkan, setelah melakukan koordinasi kepala Madrasah mengawasi agar guru yang diberikan kepercayaan untuk mengikuti pelatihan mempunyai tanggung jawab dalam mengikuti pelatihan tersebut, yang terakhir yaitu evaluasi maksudnya kepala Madrasah beserta guru dan staf mengevaluasi semua strategi yang digunakan untuk pengembangan madrasah melalui pengelolaan dana BOS.

Setelah strategi pengembangan tersebut dapat terlaksana dengan menggunakan langkah-langkah mulai dari perencanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan madrasah pendidikan melalui pengelolaan dana bos di MI Al-Karim Bendul Merisi Surabaya terlaksana dengan baik karena semua guru sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan baik, siswa kelas 6 sudah mengikuti tambahan jam pelajaran, dan pemeliharaan computer.







faktor sarana dan prasarana penunjang program, dan mekanisme program itu sendiri meliputi operasionalisasi, monitoring serta evaluasi(monev)

Hasil studi menunjukkan bahwa faktor yang mendukung efektifitas program BOS dari sisi manusianya adalah SDM yang berkualitas dan profesional sehingga dapat menjalankan program sesuai tata cara penggunaan dan BOS. motivasi dan dedikasi yang tinggi dari segenap pengelola program. Di samping itu, adanya koordinasi dan kerja sama yang solid dan cukup baik pelaksana program, dan komunikasi yang intensif antara pihak sekolah dan komite sekolah.

Faktor-faktor yang dinilai menghambat jalanya program adalah alokasi dana BOS yang sangat minim, keterlambatan penyaluran dana BOS, pengetahuan masyarakat minim tentang BOS, dan kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua dalam rapat untuk memberikan masukan dan saran untuk program di sekolah.

Mengenai dana BOS yang jumlahnya sangat terbatas akan banyak berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan kesiswaan, ditambah lagi keterlambatan penyalurannya sehingga kadang kadang pihak sekolah mengalami kesulitan, dan untuk menutupi kesulitan itu terpaksa meminta orang tua murid membayar kegiatan opsional di sekolah, dan uang orang tua akan dikembalikan setelah dana BOS turun.

Dukungan dan pengetahuan masyarakat tentang BOS juga sangat minim, hal ini karena kurangnya partisipasi masyarakat dan orang tua untuk



pendidikan dasar 9 Tahun adalah cukup baik dan cukup bermanfaat karena program BOS tersebut dapat: meringankan biaya sekolah, membantu atau meringankan beban orang tua murid yang tidak mampu, membebaskan pembayaran operasional sekolah bagi siswa tidak mampu, sangat bermanfaat bagi kalangan menengah kebawah, hendaknya program BOS diteruskan jangan hanya sampai SLTP, tetapi juga sampai SLTA, bahkan perguruan tinggi, sangat menunjang KBM di sekolah, masyarakat kecil juga dapat ikut merasakan/mengenyam pendidikan.

Adapun keunggulan program BOS yang diungkapkan oleh para informan adalah; mengurangi beban orang tua yang tidak mampu agar putera puteri mereka tetap bisa menjalani/mengakses sekolah, dapat membatu kelangsungan belajar siswa, dapat melanjutkan sekolah bagi siswa yang putus sekolah, anak menjadi rajin sekolah, sangat bermanfaat bagi murid, peningkatan mutu layanan pendidikan, anak bisa belajar dengan tenang, anak dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik, anak anak tidak lagi membayar biaya bulanan sekolah, siswa dapat memperoleh pendidikan dasar 9 tahun secara gratis, siswa dapat belajar lebih serius/giat tanpa memikirkan biaya, SPP, dan iuran lainnya, proram wajib belajar kemungkinan dapat terpenuhi, meningkatkan prestasi anak, keunggulan dalam berprestasi karena adanya dana untuk kegiatan belajar mengajar, murid murid tenang dalam belajar karena tidak lagi memikirkan tagihan bayaran, dan dapat memperlancar program belajar mengajar.



BOS, dan sarana penunjang lainnya juga turut mendukung tingkat efektifitas program yang cukup tinggi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa kekurangan program BOS adalah pada aspek penyaluran, transparansi, biaya buku dana yang kurang mencukupi/minim. Aspek aspek tersebut sebagaimana tercermin dalam pendapat respondent berikut ini: tidak jelas penggunaan dana BOS dana yang kurang mencukupi sehingga kegiatan ekstrakurikuler tidak bisa terlaksana, seperti computer, bahasa Inggris dan lain lain sangat dibutuhkan di zaman modern ini, buku pelajaran masih harus beli sendiri, dana BOS belum membiayai kegiatan kesiswaan, seperti renang, Pramuka dll, biaya diluar jam jam sekolah, kurang transparan, keterlambatan penyaluran dana BOS, dana BOS pembagiannya kurang merata, penyalurannya, masih adanya biaya untuk buku paket, sosialisasi kepada orang tua siswa masih minim, fasilitas laboratorium belum terpenuhi, dan kurang dapat memenuhi kelangsungan sekolah bagi siswa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas respondent dari keluarga tidak mampu menyatakan bahwa Kekurangan Program BOS adalah pada aspek penyalurannya, transparansi, biaya buku, dan dana yang kurang mencukupi

Faktor penghambat program BOS adalah pada aspek keterlambatan dana, dan BOS belum dapat membiayai seluruh kegiatan kesiswaan, masih

adanya pembayaran buku buku paket, minimya pemahaman orang tua siswa tentang BOS.

Dengan tidak terpenuhinya faktor-faktor penghambat ini, maka pelaksanaan program menjadi terganggu, kini kegiatan sekolah hanya terbatas pada KBM tertentu, dan kegiatan pembelajaran lainnya ditiadakan, karena kurangnya dana dan minimya partisipasi orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan Dalam hal pembiayaan . padahal sesungguhnya, keterlibatan masyrakat dan orang tua sangat dibutuhkan untuk mencapai mutu layanan pendidikan yang maksimal..

Demikian halnya faktor penghambat program yang diungkapkan oleh orang tua sisiwa tidak mampu adalah pada aspek antara lain penyaluran dana kadang kadang mengamai keterlambatan sehingga kadang kadang orang tua diminta untuk menutupi kegiatan operasional sekolah, dan setelah dana BOS turun uang yang dipungut dari orang tua segera dikembalikan, dengan dana BOS yang jumlahnya relatif kecil, banyak kegiatan kesiswaan di sekolah terpaksa dihentikan, orang tua siswa juga masih mengeluhkan pembayaran buku yang harganya cukup mahal dan trasparansi dinilai kurang oleh responden yang berujung pada kecuriigaan penyelewengan pihak sekolah.

Dengan dana yang minim dan sering terlambat serta kecurigaan orang tua atau masyarakat akan penyalahgunaan dana berpotensi untuk menghambat program atau kegiatan kegiatan di sekolah yang didanai oleh BOS.









